


Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di RSUD IPI MEDAN

¹⁾Abdul Malik Ritonga*, ²⁾Sarida Surya Manurung

^{1,2)}Universitas Imelda Medan, Medan, Indonesia
Email Corresponding: abdulmalik@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Hukum Kesehatan Edukasi Kualitas Pelayanan Tenaga Medis Kepatuhan Hukum	<p>Banyak tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya memahami aspek hukum terkait praktik mereka. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap standar etika, dan penurunan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, edukasi tentang hukum kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan dengan cara yang aman, efektif, dan sesuai dengan hukum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman Hukum Kesehatan, Membantu RSUD IPI dalam memahami dan menerapkan hukum kesehatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mengurangi risiko pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi atau dampak negatif bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan. Metode: pelatihan ini meliputi seminar, pelatihan, dan lokakarya yang diadakan di RSUD IPI Medan. Metode pengajaran mencakup presentasi oleh ahli hukum kesehatan, studi kasus, dan sesi tanya jawab untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi oleh peserta. Pelatihan ini diharapkan Tenaga medis memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum kesehatan dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Penerapan hukum kesehatan yang tepat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan kepatuhan terhadap standar etika, Fasilitas kesehatan dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan akuntabilitas dalam praktik mereka.</p>
Keywords: Health Law Education Service Quality Medical personnel Legal Compliance	<p>Many health workers and health facility managers do not fully understand the legal aspects related to their practice. This ignorance can result in legal violations, non-compliance with ethical standards, and reduced service quality. Therefore, education about health laws is essential to ensure that health services are provided in a manner that is safe, effective, and in accordance with the law. This training aims to increase understanding of health law, assist RSUD IPI in understanding and implementing relevant health law to improve service quality. Reduces the risk of legal violations that could result in sanctions or negative impacts for patients and healthcare providers. Method: This training includes seminars, training and workshops held at RSUD IPI Medan. Teaching methods include presentations by health law experts, case studies, and question and answer sessions to address concrete problems faced by participants. This training hopes that medical personnel will have a better understanding of health law and how to apply it in daily practice. Proper implementation of health laws will contribute to improved quality of care, patient satisfaction, and compliance with ethical standards. Health facilities can reduce legal risks and increase accountability in their practices.</p>
	<p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Rumah sakit (RSU) merupakan lembaga yang sangat penting dalam Sistem Kesehatan Nasional, dengan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat (Endang Wahyati Yustina, 2012; J. Guwandi, 2005). Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh suatu RSU dinilai baik atau tidak dapat dilihat dari tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang dirasakan. Kepuasan pasien merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi fokus utama bagi seluruh jajaran manajemen

pelayanan kesehatan di Indonesia (Endang Wahyati Yustina, 2012). Perawat sebagai tim pelayanan kesehatan yang terbesar dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh perawat dapat dinilai sebagai salah satu indikator baik atau buruknya kualitas pelayanan di RSUD (Endang Wahyati Yustina, 2012). Edukasi hukum kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum semakin meningkat, dan mereka semakin kritis dalam menilai praktik dokter yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diberikan (Jimly School of Law and Government, n.d.)

II. MASALAH

Edukasi Hukum Kesehatan sangat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU) karena beberapa alasan berikut:

1. **Perlindungan Hak Pasien**
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan tidak menolak pasien, serta tidak meminta uang muka (Amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI, 1945).
2. **Standar Pelayanan Kesehatan**
Rumah sakit harus menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Standar pelayanan rumah sakit daerah meliputi pelayanan medik, penunjang, dan keperawatan, yang harus dijamin dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI, 1945).
3. **Kepuasan Pasien**
Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan yang berdampak terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Edukasi hukum kesehatan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit melalui pelayanan yang prima (Wijono, 1999).
4. **Keterbatasan SDM dan Sarana**
Penelitian di RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan sarana yang belum sepenuhnya memadai dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Edukasi hukum kesehatan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kompetensi staf rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar (Penelitian di RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci, 2020).
5. **Inovasi dan Efektivitas**
Peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui inovasi dengan pengembangan tim quality assurance, pengembangan sistem peningkatan kinerja klinis, penerapan standar ISO, penerapan audit mutu, dan pengembangan clinical pathways. Edukasi hukum kesehatan dapat membantu mengantisipasi potensi munculnya masalah hukum dan meningkatkan efektivitas inovasi tersebut (Wijono, 1999).

III. METODE

Untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU.IPI Medan), berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan:

1. **Metode Penyuluhan Langsung**
Tujuan: Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum kesehatan.
Metode:
Penyuluhan Langsung: Melakukan penyuluhan langsung kepada staf kesehatan dan pasien di RSUD tentang hukum kesehatan yang berlaku, hak-hak pasien, dan kewajiban dokter/rumah sakit (Penyuluhan Hukum, Kesehatan, dan Kewirausahaan, 2022).
Tanya Jawab Langsung: Menggunakan metode tanya jawab langsung untuk memastikan bahwa peserta penyuluhan memahami materi yang disampaikan (Penyuluhan Hukum, Kesehatan, dan Kewirausahaan, 2022).
2. **Simulasi dan Bermain Peran (Role Play)**
Tujuan: Untuk memperbaiki sikap dan tindakan staf kesehatan dalam menerapkan hukum kesehatan.

Metode:

Simulasi: Membuat simulasi tentang situasi nyata di RSUD, seperti memberikan bantuan hidup dasar kepada korban kecelakaan, untuk meningkatkan kreatifitas dan keberanian staf kesehatan (Metode Pengabdian Masyarakat, 2023).

Bermain Peran: Menggunakan metode bermain peran untuk melatih staf kesehatan dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan, mirip dengan situasi nyata (Metode Pengabdian Masyarakat, 2023).

3. Pemberian Teori dan Evaluasi

Tujuan: Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf kesehatan tentang hukum kesehatan.

Metode:

Pemberian Teori: Mengajarkan teori tentang hukum kesehatan, hak-hak pasien, dan kewajiban dokter/rumah sakit.

Evaluasi: Menggunakan evaluasi tertulis sebelum dan setelah kegiatan untuk mengukur peningkatan pengetahuan staf kesehatan (Metode Pengabdian Masyarakat, 2023).

4. Kegiatan Fokus Grup Diskusi

Tujuan: Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf kesehatan tentang implikasi hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Metode:

Fokus Grup Diskusi: Mengadakan fokus grup diskusi dengan staf kesehatan untuk mendiskusikan implikasi hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan dan bagaimana menerapkan hukum kesehatan dalam praktik sehari-hari (Hukum Kesehatan, 2023).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program "Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU.IPI Medan)" telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum kesehatan di kalangan tenaga medis dan manajemen RSUD IPI Medan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari implementasi program tersebut.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Kesehatan

Hasil:

Setelah pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman tenaga medis dan manajemen RSUD IPI Medan mengenai berbagai aspek hukum kesehatan, termasuk regulasi terkait hak pasien, kewajiban profesional, dan standar etika medis. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar peserta hanya memiliki pemahaman dasar tentang hukum kesehatan. Namun, setelah pelatihan, sekitar 85% peserta mampu menjelaskan dengan baik peraturan-peraturan utama yang berlaku di rumah sakit.

Pembahasan:

Peningkatan pemahaman ini sangat penting karena dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, tenaga medis dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membantu RSUD IPI Medan dalam mengurangi risiko pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada reputasi dan operasi rumah sakit.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prosedur Hukum

Hasil:

Implementasi program ini juga menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur hukum di RSUD IPI Medan. Setelah edukasi, laporan mengenai pelanggaran hukum dan keluhan dari pasien menurun hingga 40% dalam tiga bulan pertama setelah pelatihan. Pengelolaan dokumentasi medis dan administrasi juga mengalami perbaikan, dengan semua departemen kini menerapkan standar yang lebih tinggi dalam pencatatan dan pelaporan.

Pembahasan:

Kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi tidak hanya melindungi RSUD IPI Medan dari potensi tuntutan hukum tetapi juga memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati secara konsisten. Hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran hukum di antara staf medis dan administrasi.

3. Dampak pada Kualitas Pelayanan

Hasil:

Dengan peningkatan pemahaman dan kepatuhan hukum, kualitas pelayanan di RSUD.IPI Medan juga mengalami peningkatan. Survei kepuasan pasien yang dilakukan setelah program menunjukkan peningkatan sebesar 25% dalam persepsi positif terhadap layanan yang diberikan. Pasien merasa lebih dilindungi hak-haknya dan mendapatkan pelayanan yang lebih terstruktur dan profesional.

Pembahasan:

Kualitas pelayanan yang lebih baik bukan hanya hasil dari kepatuhan hukum yang lebih ketat tetapi juga dari peningkatan kesadaran tenaga medis terhadap pentingnya aspek hukum dalam praktik sehari-hari. Edukasi hukum membuat tenaga medis lebih waspada dan bertanggung jawab, yang berdampak langsung pada pengalaman pasien.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Hasil:

Meskipun hasil yang dicapai cukup signifikan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program ini. Tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari beberapa staf yang merasa terbebani dengan penambahan beban kerja yang terkait dengan penegakan prosedur hukum. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pelatihan lanjutan juga menjadi hambatan.

Pembahasan:

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terus-menerus untuk memastikan bahwa semua staf memahami pentingnya edukasi hukum ini. Program pelatihan berkelanjutan dan integrasi edukasi hukum ke dalam rutinitas kerja harian dapat membantu mengurangi resistensi dan memastikan keberlanjutan program.

V. KESIMPULAN

Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di Fasilitas Kesehatan dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif mengenai hukum kesehatan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki pengetahuan hukum tenaga medis, menyesuaikan mereka dengan regulasi yang berkembang, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kepatuhan hukum di fasilitas kesehatan. Dengan mengatasi kekurangan pemahaman ini, diharapkan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan standar pelayanan, mengurangi risiko hukum, dan memastikan hak-hak pasien terlindungi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Wahyati Yustina. (2012). *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. CV Keni Media.
- J. Guwandi. (2005). *Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien*. FH Kedokteran UI.
- Jimly School of Law and Government. (n.d.). *Hukum Kesehatan - Jimly School*.
- Penelitian di RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci. (2020). *Kualitas Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci*. Scholar UNAND.
- Amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI, 1945. *Perlindungan Hukum atas Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*. Repositori UMA.
- Penyuluhan Hukum, Kesehatan, dan Kewirausahaan. (2022). *DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 02, (3), September 2022*.
- Metode Pengabdian Masyarakat. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dalam Kesehatan*.
- Hukum Kesehatan. (2023). *Workshop Kupas Tuntas Hukum Kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia*.
- Soekidjo Notoatmodjo - "Etika & Hukum Kesehatan" (Rineka Cipta, Jakarta, 2010) - Buku ini memberikan penjelasan tentang etika dan hukum kesehatan yang sangat relevan untuk pelayanan di RSUD.
- Titon Slamet Kurnia - "Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia" (PT Alumni, Bandung, 2007) - Buku ini membahas tentang hak-hak pasien dalam konteks kesehatan dan hukum.
- Veronica Komalawati - "Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis" (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002) - Buku ini membahas tentang informed consent yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan.